

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dan moderat, meskipun terdapat fluktuasi pada awal tahun akibat faktor musiman dan tekanan harga komoditas pangan.

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, inflasi TTS selama Triwulan I 2026 berada dalam rentang yang masih aman dibandingkan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan Inflasi year on year (y-o-y) Kabupaten TTS bulan Januari, Februari dan Maret 2026 masing-masing sebesar 2,38 persen, 1,96 persen dan 1,72 persen. Kondisi ini juga mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil serta ketersediaan barang kebutuhan pokok yang semakin membaik sepanjang Triwulan I Tahun 2026.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan inflasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Triwulan I masih didominasi oleh tingginya harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil signifikan terhadap pembentukan inflasi daerah. Kenaikan harga pada kelompok ini terutama terjadi pada awal Triwulan I, yang dipicu oleh terganggunya kelancaran distribusi barang akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung, seperti curah hujan yang tinggi dan kondisi jalan yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah. Gangguan distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan bahan pangan dari daerah produsen ke pasar-pasar, sehingga ketersediaan barang menjadi terbatas.

Karakteristik wilayah Kabupaten TTS yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas pangan strategis turut memperparah tekanan harga ketika terjadi hambatan distribusi. Terbatasnya infrastruktur transportasi serta tingginya biaya logistik juga menjadi faktor pendukung yang menyebabkan harga komoditas cenderung meningkat di tingkat konsumen. Kondisi ini diperburuk dengan adanya peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu di awal tahun, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Secara keseluruhan, kombinasi antara gangguan distribusi akibat faktor cuaca, keterbatasan pasokan, ketergantungan terhadap daerah lain, serta kendala infrastruktur dan logistik menjadi permasalahan utama yang mendorong terjadinya inflasi di Kabupaten TTS pada Triwulan I. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang lebih terintegrasi, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan, guna menekan laju inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam penanganan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan beberapa hal diantaranya:

Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara rutin dan

1. menyeluruh di berbagai pasar tradisional maupun pusat distribusi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan stabilitas harga, tetapi juga untuk mengidentifikasi secara dini potensi gangguan pasokan serta fluktuasi harga yang dapat memicu inflasi. Hasil pemantauan tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah intervensi yang tepat oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. pemerintah daerah juga secara aktif melaksanakan operasi pasar dan pasar murah sebagai bentuk intervensi langsung untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan strategis. Kegiatan ini difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, sehingga diharapkan mampu menekan laju inflasi sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, distributor, dan pelaku usaha. penguatan koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perangkat daerah terkait, distributor, agen, serta pelaku usaha. Sinergi dan kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang, mengatasi hambatan logistik, serta menjamin ketersediaan pasokan di seluruh wilayah TTS, termasuk di daerah yang sulit dijangkau.
4. Peningkatan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait kondisi harga dan ketersediaan barang. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, baik secara langsung maupun melalui media. Penyampaian informasi yang transparan dan akurat terkait kondisi harga dan ketersediaan barang bertujuan untuk membentuk ekspektasi masyarakat yang lebih rasional, serta mencegah terjadinya kepanikan dalam berbelanja (panic buying) yang dapat memperburuk tekanan inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terhadap upaya pengendalian inflasi pada Triwulan I menunjukkan perlunya penguatan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan antara lain:

1. Memperkuat ketahanan pasokan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas unggulan daerah. Hal ini dilakukan dengan mendorong optimalisasi sektor pertanian, pemanfaatan lahan produktif, serta pemberdayaan petani lokal agar mampu meningkatkan hasil produksi secara konsisten. Di sisi lain, perbaikan sistem distribusi juga menjadi perhatian penting, guna memastikan hasil produksi dapat tersalurkan secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, sehingga tidak terjadi ketimpangan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.
2. Melanjutkan serta meningkatkan intensitas pemantauan harga secara terpadu dan berkesinambungan. Pemantauan ini tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi lintas instansi, pemanfaatan data yang akurat, serta pelaporan yang cepat dan responsif. Dengan demikian, setiap potensi gejolak harga dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah intervensi yang tepat, sehingga dampaknya terhadap inflasi dapat diminimalisir.
3. Menjaga dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam pengendalian inflasi. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas harga. Melalui koordinasi yang

efektif dan komunikasi yang intensif, berbagai kendala yang dihadapi dalam pengendalian inflasi dapat diatasi secara bersama-sama, sehingga upaya yang dilakukan menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, dengan menitikberatkan pada penguatan sektor hulu hingga hilir, serta membangun kerja sama yang berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka pengendalian inflasi menekankan pada langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian, khususnya pada komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Upaya ini dilakukan dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan, peningkatan produktivitas petani, serta pengembangan sistem cadangan pangan daerah guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan.

Selain itu, optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi fokus penting, terutama dalam melakukan monitoring harga secara lebih intensif, terpadu, dan berbasis data yang akurat. TPID diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi gejolak harga serta merumuskan langkah-langkah intervensi yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

Pemerintah daerah juga merekomendasikan peningkatan sistem distribusi logistik, terutama pada saat musim hujan yang seringkali menjadi kendala utama dalam kelancaran pasokan barang. Perbaikan infrastruktur pendukung, penguatan jaringan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor menjadi langkah penting untuk memastikan barang kebutuhan pokok tetap tersedia di seluruh wilayah dengan harga yang stabil.

Di samping itu, pelaksanaan operasi pasar secara berkelanjutan untuk komoditas strategis menjadi salah satu instrumen penting dalam mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Operasi pasar diharapkan dapat dilakukan secara tepat sasaran, khususnya pada periode-periode rawan inflasi, sehingga mampu meredam lonjakan harga yang signifikan.

Pengendalian harga komoditas hortikultura juga menjadi perhatian khusus, mengingat komoditas ini cenderung memiliki volatilitas harga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pada sisi produksi, distribusi, serta stabilisasi harga melalui intervensi kebijakan yang terukur.

Secara keseluruhan, rangkaian rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara efektif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Berikut ini kami lampirkan laporan Triwulan I TPID Kabupaten Timor Tengah Selatan :
<https://drive.google.com/file/d/1AgmCOI3Ljqfj4CsuqN73xtn6RvsPEwna/view?usp=sharing>